

SKRIPSI
MEKANISME SELEKSI PERANGKAT NAGARI DI NAGARI LADANG
PANJANG BARAT KABUPATEN PASAMAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT NAGARI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIKI PERMANA

1410112149

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Didi Nazmi, S.H., M.H

Delfina Gusman, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**MEKANISME SELEKSI PERANGKAT NAGARI DI NAGARI LADANG
PANJANG BARAT KABUPATEN PASAMAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT NAGARI**

**(Riki Permana, 1410112149, Program Kekhususan Hukum Universitas
Andalas, 2019)**

ABSTRAK

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari disebutkan bahwa camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat nagari yang dikonsultasikan oleh wali nagari berdasarkan hasil penetapan tim seleksi perangkat nagari, rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan dapat didukung dengan hasil ujian tertulis atau hasil wawancara. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan seleksi perangkat nagari di Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, Bagaimana pelaksanaan seleksi Perangkat Nagari di Nagari Ladang Panjang Barat, Kabupaten Pasaman dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan seleksi perangkat nagari di Nagari Ladang Panjang Barat, Kabupaten Pasaman dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menjelaskan mengenai seleksi perangkat nagari di Kabupaten Pasaman Bagaimana Tim sel melakukan seleksi, kewenangan yang dimiliki camat dan wali nagari dalam proses seleksi perangkat nagari. Dalam proses seleksi perangkat nagari dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari Disini penulis melihat kelemahan pada peraturan daerah tersebut berupa kewenangan wali nagari dan camat dalam seleksi perangkat nagari. Dengan adanya peraturan daerah ini penulis menemukan celah adanya indikasi kecurangan yang dapat dilakukan pada proses seleksi dalam perangkat nagari, nilai hasil ujian tertulis dan wawancara Sudirman Efendi lebih tinggi dari pada nilai Toni Aprilando tetapi Toni Aprilando mempunyai hubungan kekeluargaan dengan wali nagari dan camat maka camat dapat merekomendasikan Toni Aprilando yang akan menjadi perangkat nagari atau hasil tertulis dan wawancara adalah keputusan mutlak yang harus disetujui oleh wali nagari dan camat. Ini menimbulkan dua pandangan yaitu yang pertama hasil dari ujian tertulis dan wawancara berpengaruh dalam penerimaan yang kedua hasil dari ujian tertulis dan wawancara tidak berpengaruh dalam penerimaan perangkat nagari tersebut, seharusnya didalam seleksi perangkat nagari tidak diperbolehkan adanya unsur nepotisme.